

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.5. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	31
2.1. Landasan konseptual.....	31
2.1.1. Pengertian <i>Convernote</i> Notaris	31
2.1.2. Peran dan Fungsi <i>Convernote</i> dalam Proses Pencairan Kredit Pemilikan Rumah.....	35
2.1.3. Isuk Hukum dan Tantangan <i>Convernote</i> di Perbankan	38

2.1.4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	43
2.1.4.1. Pengertian dan Kewenangan Notaris.....	43
2.1.4.2. Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap <i>Convernote</i> Notari	47
2.2. Landasan Teoritis.....	51
2.2.1. Teori Keputusan Hukum	51
2.2.2. Teori <i>Economic analysis of law</i>	54
2.2.3. Teori praktik perbankan dengan prinsip kehati-hatian	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	62
3.2. Lokasi Penelitian	63
3.3. Pendekatan Penelitian.....	64
3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>)	65
3.3.2. Pendekatan Konseptual (<i>conceptual approach</i>).....	66
3.3.3. Pendekatan Kasus (<i>case approach</i>)	67
3.4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	68
3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	70
3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74

4.1. Hasil Penelitian.....	74
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	74
4.1.1.1. Profil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN)	74
4.1.1.2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi	76
4.1.2. Kedudukan dan kekuatan hukum <i>covernote</i> yang diterbitkan oleh notaris dalam proses pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	82
4.1.3. Penerbitan dan penggunaan <i>covernote</i> oleh Notaris sebagai dasar pencairan kredit pemilikan rumah tersebut telah sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang- Undang Jabatan Notaris	87
4.1.4. Tinjauan yuridis <i>Covernote</i> Sebagai Dasar Pencairan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan	

Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	91
4.1.5. Hambatan yang dihadapi akibat penggunaan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	96
4.2. Pembahasan	100
4.2.1. Analisis Kedudukan dan Kekuatan Hukum <i>Covernote</i> yang Diterbitkan oleh Notaris dalam Proses Pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya Dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notari	100
4.2.2. Analisis Penerbitan dan Penggunaan <i>Covernote</i> oleh Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.....	104
4.2.3. Analisis Yuridis <i>Covernote</i> Sebagai Dasar Pencairan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-	

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	108
4.2.4. Analisis Hambatan yang Dihadapi Akibat Penggunaan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	122